

Gedung Setda Batal Dibangun

SALATIGA – Pembangunan Gedung Setda Kota Salatiga senilai Rp23 miliar batal dilaksanakan pada tahun anggaran 2014. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cipkataru) Kota Salatiga tidak sanggup mengerjakan proyek tersebut di ini karena waktu efektif tinggal tujuh bulan lagi.

Pembangunan gedung kantor berlantai empat itu diperkirakan membutuhkan waktu selama 10 bulan. Proyek ini akan dianggarkan kembali dan dilak-

sanakan pada 2015.

Kepala Dinas Cipkataru Kota Salatiga Susanto mengatakan, kebijakan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan teknis.

"Pembangunan gedung empat lantai membutuhkan waktu selama 10 bulan. Karena hingga Mei lalu proyek ini belum ditenderkan, kami putuskan untuk membatalkannya dan pembangunan akan kami laksanakan pada 2015 mendatang," ucapnya kemarin.

Sebelum mengambil kebijakan tersebut, Dinas Cipkataru Kota Salatiga telah melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah. "Oleh BPK dan BPKP, kami

disarankan untuk membangun gedung setda pada 2015 nanti. Alasannya, kalau pembangunan dilaksanakan tahun ini, waktunya tidak cukup," papar Susanto.

Mei lalu Dinas Cipkataru telah mengambil kebijakan mengenai rencana pembangunan Gedung Kantor Setda Kota Salatiga. Saat itu Dinas Cipkataru memutuskan melaksanakan pembangunan 50% dari perencanaan dengan anggaran sekitar Rp11,5 miliar. Keputusan tersebut diambil dengan berbagai pertimbangan, utamanya me-

nyangkut masalah teknis dan nonteknis. Teknisnya, pembangunan membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal sebelum proyek tersebut ditenderkan, harus ada kajian manajemen konstruksi agar pelaksanaan pembangunan bisa tepat waktu dan berjalan dengan baik. "Kajian manajemen konstruksi harus dilakukan oleh konsultan. Mekanismenya harus melalui lelang. Ini juga membutuhkan waktu," ucapnya.

Kalangan anggota DPRD Kota Salatiga menyangkan ki-

nerja eksekutif yang tidak sesuai dengan perencanaan. Mereka meminta Wali Kota Salatiga Yuliyanto mengambil sikap tegas agar program pembangunan yang telah ditetapkan pada APBD 2014 bisa berjalan optimal. "Wali kota harus tegas dan jangan bosan menegur kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang tidak bisa bekerja dengan baik. Wali kota harus mendorong kepala SKPD untuk melaksanakan program pembangunan yang telah terencana," tandas anggota Fraksi PDIP

DPRD Kota Salatiga Suniprat.

Anggaran pengadaan barang dan jasa Pemkot Salatiga pada 2014 mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, Mei ini penyerapan anggaran tersebut sangat lambat. "Hingga Mei ini sebagian besar kegiatan pengadaan barang dan jasa belum dilaksanakan. Maunya eksekutif itu apa? Semestinya silpa (sisalebih pembiayaan anggaran) 2013 yang mencapai Rp192 miliar menjadi pembelajaran dan tahun ini jangan sampai terulang lagi," tandasnya.

● **angga rosa**